

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI PENYELESAIAN
DALAM PERKARA PENIPUAN ATAU PENGHELAPAN
PADA TINGKAT PENUNTUTAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purbalingga)**

**Disusun Oleh:
Devina Amri Fadhilah
E1A021111**

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dan penghelapan merupakan dua bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam praktik penyelesaian perkara kedua tindak pidana tersebut, selama ini lebih menekankan pada keadilan retributive. Restorative justice hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban dan pelaku melalui proses perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice serta hambatan yang dilalui Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menangani kasus tindak pidana penipuan atau penghelapan motor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang sumber data primernya diperoleh dari wawancara dengan jaksa, pelaku dan korban sedangkan untuk data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam kasus penipuan atau penghelapan motor di Kejaksaan Negeri Purbalingga telah berjalan dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Namun, dalam penerapannya, terdapat hambatan yang dihadapi berdasarkan teori Lawrence M. Friedman. Pertama, hambatan dari faktor struktural hukum yaitu adanya tumpang tindih kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara dengan restorative justice. Kedua, dari faktor sosial masyarakat yang masih memiliki budaya hukum formalistik dan retributive. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung efektivitas restorative justice.

Kata Kunci: *Restorative justice*, penipuan, penghelapan, sistem peradilan pidana

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS A RESOLUTION IN
FRAUD OR EMBEZZLEMENT CASES AT THE
PROSECUTION LEVEL**

(Case Study at the Purbalingga District Prosecutor's Office)

Compiled By:

Devina Amri Fadhilah

E1A021111

ABSTRACT

Criminal acts of fraud and embezzlement are among the most common crimes in Indonesian society. In practice, the resolution of these cases has predominantly emphasized retributive justice. Restorative justice emerges as an alternative approach to criminal case resolution, focusing on the recovery of both victims and offenders through a reconciliation process. This study aims to analyze the implementation of restorative justice and the obstacles encountered by the Purbalingga District Prosecutor's Office in handling cases of fraud or motorcycle embezzlement. This research employs a socio-legal method, with primary data obtained from interviews with prosecutors, offenders, and victims, while secondary data is gathered from literature studies. The findings indicate that the implementation of restorative justice in fraud or motorcycle embezzlement cases at the Purbalingga District Prosecutor's Office has been conducted in accordance with applicable regulations. However, its application faces several challenges based on Lawrence M. Friedman's theory. First, from a legal structural perspective, there is an overlap in authority between the police and the prosecutor's office in resolving cases through restorative justice. Second, from a socio-cultural perspective, the community still adheres to a formalistic and retributive legal culture. Therefore, it is necessary to enhance inter-institutional coordination and conduct public awareness campaigns to support the effectiveness of restorative justice.

Keywords: Restorative justice, fraud, embezzlement, criminal justice system